

SIARAN PERS

Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan dan Karimun

Batam, 25 Juni 2006 - Pada hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan Persetujuan Kerangka tentang Kerjasama Ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

Persetujuan yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang bertujuan mengembangkan kerjasama ekonomi dalam Kawasan Ekonomi Khusus/Special Economic Zones (KEK/SEZs) di Pulau Batam, Bintan dan Karimun, serta kemungkinan serupa di lokasi lainnya di Indonesia.

Kedua pemimpin itu yakin bahwa keberhasilan implementasi dari kerangka perjanjian itu penting dalam menjamin pembangunan KEK yang memiliki daya saing tinggi di kawasan ini, yang juga akan menjadi contoh bagi pengembangan KEK di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Hal itu merupakan pertanda jelas komitmen politik kedua belah pihak untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan yang dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara.

Pembangunan KEK itu dilandaskan kepada pedoman dasar untuk pengembangan kerangka institusional yang efektif, kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan, penyederhanaan prosedur investasi, pengembangan infrastruktur yang efisien dan pengelolaan administratif kawasan yang efektif. Lingkup kerjasama di antara kedua pihak itu dalam menjamin keberhasilan pengembangan KEK mencakup penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas. Selain kerjasama pengembangan KEK, kerjasama yang disetujui itu juga mencakup pariwisata dan pengembangan tempat peristirahatan, pertanian, budidaya laut, promosi UKM, pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia dan jasa pendidikan.

Tujuan Strategis dan Keuntungan Bersama

Pembangunan KEK ini adalah salah satu strategi Indonesia mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional. Untuk mencapai hal itu, Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian tengah menyelesaikan kerangka kebijakan untuk KEK.

Kerangka kebijakan itu mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK; menyetujui kebijakan-kebijakan

yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu; dan, yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain pembebasan PPN dan PPn BM untuk produk yang diekspor kembali dengan prosedur yang sederhana; fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing yang sederhana; dan, yang terpenting adalah proses pelayanan investasi dimana investor dapat memperoleh seluruh perijinan dan kebutuhan dokumentasi serta penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap dalam waktu singkat.

Kerjasama RI-Singapura ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi konsep KEK. Sementara kerangka kerjasama pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun tetap merupakan kebijakan Indonesia, pengalaman keberhasilan Singapura mengembangkan kawasan serupa di berbagai negara diharapkan mendukung implementasi yang efektif. Sekalipun demikian, kerjasama kedua negara itu tidak menghalangi Indonesia membina kerjasama serupa dengan negara lain di tiga pulau itu maupun wilayah lainnya.

Pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun akan membawa keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk peningkatan investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan perminyakan di Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia. Saat ini juga sudah terdapat sejumlah galangan kapal yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini terdapat semakin banyak investor dari mancanegara yang berminat berinvestasi di industri perminyakan dan galangan kapal

Untuk manufaktur, prioritas diberikan untuk membangun dan meningkatkan berbagai sub-sektor yang sudah memiliki basis kuat di Batam dan Bintan seperti elektronika, kimia, precision equipment, dan juga manufaktur lainnya seperti pakaian jadi. Selain pengembangan sektor industri, kerjasama kedua negara ini juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya di bidang pariwisata dan jasa seperti pengembangan resor dan fasilitas serta jasa pameran, konperensi; pertanian dan perikanan. Terdapat pula potensi lainnya untuk pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk KEK maupun secara lebih luas. Politeknik Batam yang juga diresmikan Presiden RI hari ini merupakan bukti nyata kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia.

Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya. Keberhasilan implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan utama Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK yang pertama adalah karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai,

besarnya jumlah investasi dalam dan luar negeri di kawasan itu, dan lokasi geografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat.

Ruang Lingkup dan Implementasi Persetujuan Implementasi Persetujuan mengenai Kerangka Kerjasama itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Pengarah Bersama yang diketuai bersama oleh Menteri Boediono dan Menteri Lim Hng Kiang. Pertemuan pertama komite itu akan dilaksanakan dalam periode 3 bulan ke depan untuk menyepakati rencana aksi untuk implementasi kerjasama itu, serta mempromosikan dan mengadopsi proposal-proposal berorientasi pasar. Rencana Aksi itu akan diimplementasi oleh Komite Kerja Bersama yang diketuai bersama oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Chairman dari Singapore Economic Development Board.

Rencana aksi itu akan berisi prioritas jangka pendek menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang dihadapi para investor di wilayah itu, dan menjamin perbaikan mendasar dari penerapan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Secara bersamaan, rencana aksi itu juga akan menggambarkan langkah-langkah konkret yang diperlukan dengan batasan waktu yang jelas, mengidentifikasi kerangka kebijakan yang diperlukan untuk KEK, dan membentuk unit pelayanan investasi yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan pengelolaannya, serta dukungan sumber daya manusia yang diperlukan.
